

**PENGARUH KEMAMPUAN MEMBAYAR PAJAK DAN DILEMA
SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI
KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP
PRATAMA MAKASSAR SELATAN)**

SKRIPSI



**SALSABILA
105731117922**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

**PENGARUH KEMAMPUAN MEMBAYAR PAJAK DAN DILEMA
SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI
KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP
PRATAMA MAKASSAR SELATAN)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

SALSABILA

NIM: 105731117922

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah Adalah Dzat Yang Menatap Hamba-Nya Tanpa Libur. Dan Kini,
Dia Pun Dzat Yang Paling Harus Kuhubungi Sebelum Siapapun”

*“Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidup Dan Matiku Hanya Karena
Allah SWT”*

(QS. Al-An'am: 162)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya
Sehingga Skripsi Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti Dan
Terima Kasihku Kepada Kedua Orang Tuaku Ibunda Indriati, S.Pd Dan
Bapak Hasanuddin, SE Yang Saya Cintai, Orang-Orang Yang Saya
Sayang Dan Almamaterku

PESAN

“Sesungguhnya Kita Hidup di Dunia Ini Hanya Untuk Menunggu Dua
Waktu, Yaitu Waktu Shalat dan Waktu Kematian”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak dan Dilema Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan)

Nama Mahasiswa : Salsabila

No. Stambuk/NIM : 105731117922

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia Penguji Skripsi strata (S1) pada tanggal 31 Agustus 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 September 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Mira, SE., M.Ak., Ak
NIDN: 0903038803

Pembimbing II

Masrullah, SE., M.Ak
NIDN: 0923089201

Mengetahui,



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Akuntansi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Salsabila, NIM : 105731117922 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0010/SK-Y/62201/091004/2024, Tanggal 26 Safar 1446 H/ 31 Agustus 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

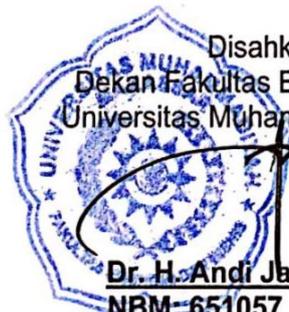
Makassar, 05 Rabiul Awal 1446 H

09 September 2024 M

PANITIA UJIAN

- | | | | |
|---|---------------|---|--|
| 1 | Pengawas Umum | : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T.,M.T.,IPU
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2 | Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3 | Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 4 | Penguji | : 1. Mira, SE., M.Ak., Ak
2. Abd. Salam, SE., M.Si., Ak.CA
3. Masrullah, SE., M.Ak
4. Endang Winarsih, SE., M.Ak | (.....)
(.....)
(.....)
(.....) |

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Salsabila

No. Stambuk/NIM : 105731117922

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak dan Dilema Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Makassar, 09 September 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Salsabila

NIM: 105731117922



Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057

Diketahui Oleh:

Ketua Prodi Akuntansi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Salsabila
No. Stambuk/NIM : 105731117922
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak dan Dilema Sosial Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama
Makassar Selatan)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 09 September 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Salsabila
NIM: 105731117922

ABSTRAK

SALSABILA. 2022. *Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak Dan Dilema Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Mira, SE., M.Ak., Ak dan Masrullah, SE., M.Ak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan membayar pajak dan dilema sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian ini diambil dari KPP Pratama Makassar Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan pembagian kuesioner. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode skala Likert. Berdasarkan hasil penelitian data dengan menggunakan perhitungan statistik melalui aplikasi *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 25 mengenai pengaruh kemampuan membayar pajak dan dilema sosial terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis menarik kesimpulan yaitu kemampuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara dilema sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Kemampuan Membayar Pajak, Dilema Sosial, Kepatuhan Wajib Pajak*

ABSTRACT

SALSABILA. 2022. *The Influence Of Tax Paying Ability and Social Dilemmas On Taxpayer Compliance (Case Studi On Individual Taxpayers At The South Makassar Pratama Tax Office)*. Thesis. Accounting Department. Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by : Mira, SE., M.Ak., Ak and Masrullah, SE., M.Ak.

This research is a type of quantitative research with the aim of determining the effect of tax paying ability and social dilemmas on tax compliance. The sample of this research was taken from KPP Pratama South Makassar. The type of data used in this study is quantitative data obtained from questionnaires that are distributed and related to the problem being studied. Data collection is done by observation and distribution of questionnaires. In this study, the data sources used in data collection include primary data and secondary data. The research instrument used in this study uses the Likert scale method. Based on the results of data research using statistical calculations through the SPSS version 25 application regarding the effect of tax paying ability and social dilemmas on taxpayer compliance, the author draws the conclusion that tax paying ability does not affect tax compliance, while social dilemmas affect tax compliance.

Keywords: *Tax Payability, Social Dilemma, Tax Compliance*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang tersayang Bapak **Hasanuddin, SE** dan Ibu **Indriati, S.Pd** yang senantiasa memberi harapan, perhatian, kasih sayang, doa tulus tak pamrih dan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih telah menjadi ayah dan ibu yang sempurna untuk anaknya, memenuhi segala kebutuhan dan keinginan anaknya, mendidik dan membesarkan anaknya dengan ilmu agama, dan selalu mengupayakan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan beribu-beribu kebaikan serta bahagia dunia akhirat.

Dan terkhusus kepada keluargaku yang lain, saudara kandungku tercinta Muhammad Alfarezi dan Hamdani, Bibi Andun, Bibi Las, Kakek, Nenek, dan Paman-pamanku, penulis haturkan doa dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas berbagai bantuan yang diberikan hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak., Ak, selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah berkenan membantu memberikan dukungan, bantuan, dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
4. Bapak Masrullah, SE., M.Ak, selaku Pembimbing 2 sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran kepada penulis selama masa perkuliahan hingga ujian akhir skripsi ini.
5. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Segenap staf karyawan FEB Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Terima kasih penulis haturkan kepada pihak KPP Pratama Makassar Selatan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku Ica, Khairul, dan Ainun yang telah berjuang bersama dari D3 hingga S1, saling membantu dan memberikan semangat. Terima kasih juga kepada Yusrida yang melengkapi momen perjuangan S1 ini. Semoga apa yang mereka harapkan di masa depan dapat terwujud.
9. Terkhusus kuucapkan terima kasih kepada sahabatku Ainun Mardiya, yang selalu mendukung dan menemani penulis selama di perantauan, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan dan selalu memberikan contoh tentang kebaikan. Terima kasih Nun telah membuktikan bahwa saudara tidak harus sedarah. Semoga hal-hal baik selalu menemani langkahmu.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses tugas akhir ini selesai.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 09 September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	9
2. <i>Theory of Slippery Slope</i>	10
3. Pajak.....	12
4. Kemampuan Membayar Pajak.....	15
5. Dilema Sosial.....	16
6. Kepatuhan Pajak (<i>Tax Compliance</i>)	19
B. Penelitian Terdahulu.....	21
C. Kerangka Pikir	28
D. Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Jenis dan sumber data	31
D. Populasi dan Sampel.....	31
E. Definisi Operasional Variabel	33
F. Metode Analisis Data.....	36
G. Analisis Regresi Berganda	40
H. Uji Hipotesis.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
B. Karakteristik Responden	48
C. Analisis Data Deskriptif Variabel	51
D. Hasil Analisis Data.....	55
1. Uji Kualitas Data.....	55
2. Pengujian Asumsi Klasik.....	57
3. Analisis Regresi Berganda.....	60
4. Uji Hipotesis.....	61
E. Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	72
BIOGRAFI PENULIS.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Lereng Licin (<i>Slippery Slope</i>)	11
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan.....	44
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas	59



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	34
Tabel 3.2	Ketentuan Pengukuran Instrumen Penelitian.....	36
Tabel 4.1	Nilai-nilai Kementerian Keuangan	43
Tabel 4.2	Distribusi Sampel Kuesioner	49
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	50
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	50
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	51
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Mengenai Variabel X1	52
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Mengenai Variabel X2	53
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Mengenai Variabel Y	54
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas	56
Tabel 4.11	Hasil Uji Reliabilitas	57
Tabel 4.12	Hasil Uji Normalitas	58
Tabel 4.13	Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4.14	Analisis Regresi Berganda	60
Tabel 4.15	Hasil Uji R ²	61
Tabel 4.16	Hasil Uji t	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Permohonan Izin Penelitian.....	73
Lampiran 2	Izin Penelitian.....	74
Lampiran 3	Persetujuan Izin Riset.....	75
Lampiran 4	Surat Permohonan Pengisian Kuesioner Penelitian	76
Lampiran 5	Hasil Pengumpulan Data Kuesioner	81
Lampiran 6	Presentase Jenis Kelamin Responden	81
Lampiran 7	Presentase Umur Responden	81
Lampiran 8	Presentase Pendidikan Responden	82
Lampiran 9	Hasil Analisis Tanggapan Responden	82
Lampiran 10	Rekapitulasi Data Kuesioner Variabel X1	84
Lampiran 11	Rekapitulasi Data Kuesioner Variabel X2	86
Lampiran 12	Rekapitulasi Data Kuesioner Variabel Y	88
Lampiran 13	Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan Membayar Pajak (X1)	90
Lampiran 14	Hasil Uji Validitas Variabel Dilema Sosial (X2)	91
Lampiran 15	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	93
Lampiran 16	Hasil Uji Reliabilitas Kemampuan Membayar Pajak (X1)	94
Lampiran 17	Hasil Uji Reliabilitas Dilema Sosial (X2).....	94
Lampiran 18	Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	94
Lampiran 19	Hasil Uji Normalitas	95
Lampiran 20	Hasil Uji Multikolonieritas.....	95
Lampiran 21	Hasil Uji Heteroskedastisitas	96
Lampiran 22	Hasil Analisis Berganda.....	96
Lampiran 23	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	97
Lampiran 24	Hasil Uji Signifikan T	97
Lampiran 25	Hasil Uji Simultan F	97
Lampiran 26	Surat Keterangan Bebas Plagiasi	98
Lampiran 27	Dokumentasi	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan pondasi bagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia. Salah satu pendapatan negara yang diyakini menjadi andalan dan tulang punggung APBN adalah pendapatan yang bersumber dari pajak. Berdasarkan postur RAPBN tahun 2023, pemerintah memproyeksikan penerimaan negara sebesar Rp.2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp.2.016,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.426,3 triliun (RUU APBN TA 2023). Angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan diproyeksikan dapat menopang pendapatan negara sampai dengan 82,54%. Ini berarti bahwa penerimaan pajak merupakan hal yang vital bagi perekonomian di Indonesia.

Namun demikian, *tax ratio* Indonesia masih terhitung rendah jika dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN dan anggota G20 lainnya. Dalam Konferensi Pers APBN pada bulan Januari 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa *tax ratio* selama tahun 2023 hanya sebesar 10,21%, ini lebih rendah dari capaian tahun lalu yang sebesar 10,39%. World Bank menyatakan jika suatu negara ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka suatu negara wajib memiliki *tax ratio* minimal 15%. Rendahnya angka *tax ratio* di Indonesia menunjukkan masih belum optimalnya kinerja penerimaan pajak.

Pusat Studi Ekonomi dan Perpajakan (PSEP) pada rilis bulan Maret 2019 mengidentifikasi tiga penyebab utama rendahnya angka *tax ratio* di

Indonesia, salah satu faktor penyebabnya yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun penerimaan pajak sejak tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami peningkatan, namun jumlah yang berhasil dikumpulkan masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan basis pajak yang ada.

Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, hingga 31 Maret 2024 tercatat sebanyak 12,7 juta wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan SPT Tahunannya. Sementara jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2024 adalah 17,21 juta. Hal ini berarti masih terdapat 4,51 juta wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT Tahunannya secara tepat waktu.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga telah sejak lama menjadi perhatian otoritas pajak. Kepatuhan wajib pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara (Andreoni, et.al., 1998).

Masalah kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu masalah di bidang perpajakan. Konsep kepatuhan yang sukarela dari wajib pajak dibutuhkan karena sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *Self Assesment System* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000). *Self Assesment System* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk membayar, melapor, dan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini memerlukan kesadaran yang tinggi untuk mewujudkan kepatuhan pajak. Maka selain peran petugas pajak, dibutuhkan juga peran wajib pajak untuk berkontribusi mengoptimalkan penerimaan negara.

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	Jumlah WP OP Yang Terdaftar	Jumlah WP OP Efektif	Jumlah Kepatuhan SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan
2019	162.481	56.674	49.344	87%
2020	193.157	59.607	57.937	96%
2021	206.165	63.380	61.395	96%
2022	220.039	71.338	65.504	91%
2023	231.583	77.585	56.285	72%

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan (2024)

Di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, sikap kepatuhan yang dicerminkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam tindakan pelaporan dan membayar kewajiban perpajakannya masih belum maksimal. Dapat dilihat dari table 1.1 diatas tingkat kepatuhan yang tidak menyentuh angka 100% dalam 5 tahun berturut-turut. Jika dilihat dalam rata-rata tahun, ada jumlah peningkatan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPTnya, namun tingkat pelaporan tahunannya tidak pernah sebanding dengan jumlah wajib pajak yang semestinya memiliki kewajiban melaporkan pajaknya, terlebih pada tahun 2023 yang menunjukkan tingkat kepatuhan hanya 71%, angka tersebut cenderung masih sangat rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan.

Pemerintah pada dasarnya telah memberlakukan sanksi dan denda bagi wajib pajak yang tidak patuh dengan kewajiban perpajakannya. Namun

realitanya, masih banyak wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan beberapa faktor. Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang perilaku kepatuhan pajak mengasosiasikan bahwa model kepatuhan pajak tradisional yang mengandalkan pemeriksaan dan denda sudah tidak lagi meyakinkan hingga diperlukan adanya faktor penentu lain berupa faktor psikologis (Cahyonowati et al., 2023; Gangl et al., 2015; Mahadianto & Astuti, 2017; Mangoting et al., 2013; Susilawati & Hidayat, 2019). Hal ini karena kesadaran bahwa analisis penelitian dengan menggunakan variabel-variabel *deterrence* saja tidak cukup dapat menjelaskan tingkat kepatuhan pajak

Faktor psikologis merupakan faktor yang hadir dari dalam individu, hal ini berkaitan dengan faktor internal wajib pajak. Salah satu faktor internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seorang wajib pajak adalah kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk membayar pajak (Pricillia, 2023). Dalam sistem pemungutan pajak, kemampuan wajib pajak dikategorikan sebagai kemampuan daya pikul, yaitu suatu asas perpajakan yang menegaskan bahwa pajak harus dipungut berdasarkan kemampuan seseorang dalam membayar pajak.

Menurut DDTC, kemampuan membayar pajak merupakan salah satu prinsip pemungutan pajak yang diasumsikan bahwa jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak harus mencerminkan kemampuan ekonomis wajib pajak untuk menanggung beban tersebut. Ini berarti bahwa sistem pemungutan pajak harus berdasarkan pada kemampuan wajib pajak. Pada beberapa negara, kepatuhan pajak pada umumnya mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan.

Penelitian mengenai pengaruh kemampuan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian Karlinah (2022) menyatakan bahwa kemampuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsyil (2022) yang menyatakan bahwa variabel kemampuan membayar tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Pricillia (2023) menyatakan bahwa kemampuan finansial berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Faktor internal lain yang juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana individu bersikap dalam kepatuhan pajak yaitu dilema sosial yang dirasakan oleh wajib pajak. Dilema sosial sendiri dapat didefinisikan sebagai situasi yang menempatkan kepentingan pribadi berhadapan dengan kepentingan bersama (Van Vugt, 2002). Gang et al. (2015) menyatakan bahwa keputusan kepatuhan pajak menunjukkan adanya dilema sosial yaitu wajib pajak harus memilih antara meminimalkan pajak agar utilitas individu meningkat dalam jangka pendek atau memilih membayar pajak agar berkontribusi pada penyediaan fasilitas publik untuk kepentingan kolektif jangka panjang. Pada dasarnya, terdapat konflik kepentingan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Dalam situasi dilema sosial terhadap kepatuhan pajak, aspek kepercayaan dan norma sosial menjadi relevan untuk mewujudkan sikap kooperatif. Kepercayaan menunjukkan harapan bahwa pihak lain memiliki motif yang baik dalam interaksi sosial yang melibatkan konflik kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Secara umum wajib pajak akan

bersedia membayar pajak hanya jika ada kepercayaan. Apabila wajib pajak percaya bahwa wajib pajak lain juga membayar pajak, bahwa pajak yang dibayarkan tidak disalahgunakan melalui korupsi, negara bisa dipercaya dalam mengelola keuangan dan dapat memanfaatkan anggaran yang berasal dari pajak dengan baik, maka dilema sosial terhadap kepatuhan pajak akan dapat teratasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan dan norma sosial dapat menjadi faktor penjelas dalam dilema kepatuhan pajak. Sejauh pengetahuan penulis, Cahyonowati adalah peneliti pertama yang menggunakan peran norma sosial sebagai faktor dilema sosial. Variabel norma sosial sebagai faktor dilema sosial dikembangkannya sejalan dengan Deglaire dkk. (2020) dan Alm dkk. (2019) yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan pajak seseorang dipengaruhi oleh persepsi atas perilaku kepatuhan wajib pajak lainnya.

Sementara itu, Gangl (2015) mengemukakan bahwa konsep kepatuhan sebagai dilema sosial yaitu berdasarkan pada kekuasaan dan kepercayaan. Hal ini sejalan dengan teori *slippery slope framework* yang dikemukakan oleh Kirchler (2008) yang menyatakan bahwa dilema sosial dapat diselesaikan dan kepatuhan pajak dapat dijamin dengan kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dilihat dari faktor internal yang terdapat dalam diri wajib pajak itu sendiri. Karena ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka penulis memilih menggunakan variabel kemampuan membayar pajak untuk menemukan

hasil yang lebih jelas terkait pengaruh kemampuan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan variabel dilema sosial sebagai faktor internal dengan memasukkan aspek kepercayaan, kekuasaan dan norma sosial untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dari Cahyonowati (2023).

Untuk menunjang pernyataan diatas, penelitian ini pun menggunakan teori atribusi yang menempatkan bahwa perilaku seseorang ditunjang oleh faktor internal dan kekuatan dari eksternal (Heider, 1958). Teori ini membantu mencari tahu penyebab yang membuat seseorang menjadi patuh maupun tidak patuh terhadap pajak. Dan untuk lebih rinci terhadap faktor internal dari sisi psikologis, penelitian ini turut menganut teori *slippery slope framework* yang berasumsi bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kepercayaan dan kekuasaan dari otoritas. Teori ini mendukung penelitian dengan mencari tau apakah faktor psikologis seperti dilema sosial dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian dan pernyataan di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak dan Dilema Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kemampuan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah dilema sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh kemampuan membayar pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh dilema sosial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan yang memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada pembaca terkait kemampuan membayar pajak dan dilema sosial terhadap kepatuhan pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait yaitu KPP Pratama Makassar Selatan maupun DJP sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan sistem dan kebijakan untuk peningkatan kepatuhan pajak.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang mirip agar dapat terus berkembang untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi awal mulanya oleh Fritz Heider dicetuskan dan dimaknai sebagai penjelasan perilaku seseorang. Menurut Hedier (1985), teori atribusi merujuk kepada pengertian bahwa terdapat suatu perilaku yang berhubungan dan menjadi sebab dari bagaimana individu bersikap. Dalam kehidupan dan situasi sosial seringkali kita berusaha memahami bagaimana individu lain bersikap/ perilaku orang lain dan secara naluriah kita mencaritahu apa yang menyebabkan/ melatar belakanginya suatu individu melakukan hal tersebut. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008).

Faktor internal sendiri diketahui sebagai berbagai faktor yang bersumber dari dalam diri individu seperti faktor jasmani dan psikologis. Sedangkan faktor eksternal sendiri adalah berbagai faktor yang bersumber dari luar diri individu. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Teori atribusi dalam konsep kepatuhan pajak menekankan pada bagaimana individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain.

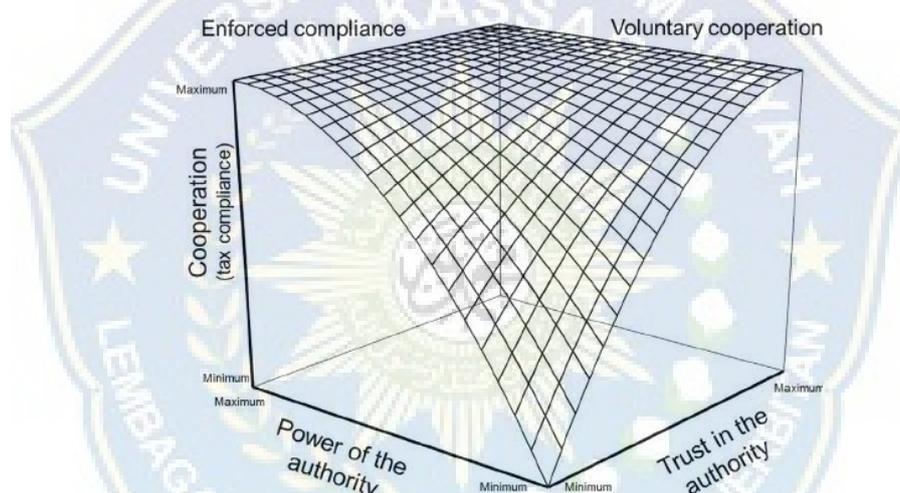
Teori atribusi oleh penulis dianggap relevan pada penelitian ini karena dalam mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori atribusi mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam konteks kepatuhan pajak, wajib pajak akan menilai apakah mereka patuh karena memiliki kemampuan terhadap kewajiban perpajakannya atau karena ada faktor eksternal seperti persepsi terhadap pemerintah. Dengan demikian, teori atribusi menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal (kesadaran, kepribadian, kemampuan) dan faktor eksternal (pelayanan, kemudahan, sanksi).

2. *Theory of Slippery Slope*

Salah satu teori terkini tentang kepatuhan pajak adalah *slippery slope* model dari Kirchler et al. (2008). Teori *Slippery Slope Framework* ini pertama kali dikenalkan oleh Erich Kirchler pada tahun 2007 dalam bukunya "*The Economic Psychology of Tax Behaviour*". Teori ini menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan *deterrence* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*), sedangkan variabel *deterrence* cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan atau *enforced tax compliance*).

Kirchler merangkai penelitian mengenai kepatuhan pajak dan mengintegrasikan berbagai teori dan temuannya ke dalam interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak. Selain itu Kirchler juga memfokuskan kepatuhan pajak dalam representasi sosial. Hasil penelitian Kirchler

menunjukkan lereng yang licin dari kepatuhan pajak. Model lereng yang licin tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela akan tinggi jika interaksi dengan pihak berwenang dilakukan dengan penuh rasa saling percaya dan jika masyarakat memahami hukum dan memandang pajak didistribusikan secara adil, dan jika mereka mengembangkan norma-norma sosial yang baik, yaitu saat mereka memiliki representasi sosial yang baik mengenai perpajakan. Dibawah ini adalah gambaran model lereng licin yang menampilkan pengaruh kekuasaan dan kepercayaan terhadap kepatuhan pajak:



Gambar 2.1 Model Lereng Licin (*Slippery Slope*)

Berdasarkan gambar 2.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa teori *slippery slope* adalah suatu teori kepatuhan pajak yang mendasarkan bahwa kepatuhan pajak akan muncul karena dua hal yaitu *Power of Authorities* dan *Trust in Authorities*. *Theory of Slippery Slope* menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Menurut Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) teori ini mengintegrasikan hasil penelitian mengenai faktor-faktor penentu

dari kepatuhan pajak tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi psikologis.

Teori *slippery slope* oleh penulis dianggap relevan dengan konsep penelitian ini karena untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan serta membayarkan pajaknya ditunjang oleh berbagai faktor seperti faktor psikologis berupa kepercayaan dan norma sosial dan faktor *deterrence* berupa kekuasaan. Penelitian oleh Cahyonowati dkk. (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan dan norma sosial merupakan bagian dari dilema sosial terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) **Fungsi *budgetair* (anggaran)**, artinya pajak mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 2) **Fungsi *regularend* (pengatur)**, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal

perekonomian, sosial, politik, budaya, pertahanan maupun keamanan misalnya dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif, memberikan pengecualian atau keringanan-keringanan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:9) mengemukakan dalam pemungutan pajak terbagi menjadi 3 sistem pemungutan, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya diwenangkan kepada Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak dapat menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

3) *With Holding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

d. Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus di bayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus di bayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk

rumah tangga negara selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

4. Kemampuan Membayar Pajak

a. Definisi Kemampuan Membayar Pajak

Dalam kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan kemampuan sebagai dorongan dari dalam diri yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam konsep kemampuan membayar pajak menurut Handayani dkk. (2012) dikembangkan pula melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemampuan membayar dan konsep pajak.

Kemampuan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan yang kedua adalah konsep pajak, yaitu suatu prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada pemerintah (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Jame Alm menekankan bahwa kemampuan membayar pajak tidak hanya terkait dengan tingkat pendapatan, tetapi juga dengan perilaku kepatuhan pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan membayar pajak yaitu kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi terhadap keadilan pajak.

b. Teori Kemampuan Membayar Pajak (Ability To Pay)

Teori yang dikemukakan oleh Kendrick (1939) dikutip dari Aloo (2012) yang dimaksud dengan teori kemampuan untuk membayar adalah suatu yang dianggap kewajiban pajak dalam bentuk aslinya, pembayaran wajib pajak kepada negara tanpa kompensasi atau ganti rugi. Tidak menganggap adanya hubungan komersial atau semi komersial antara negara dan warga negara. Menurut teori ini, seorang warga negara membayar pajak karena mereka mampu dan relatifnya bagian dalam total beban pajak akan ditentukan oleh relatifnya kemampuan membayar pajak. Teori ini sangat didukung oleh para pemikir sosialis karena kesesuaiannya dengan gagasan dan konsep keadilan dan kesetaraan. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa beban perpajakan harus dibagi oleh anggota masyarakat pada prinsip keadilan dan kesetaraan dan bahwa prinsip-prinsip ini mengharuskan beban pajak dibagi menurut teori kemampuan relative mereka untuk membayar.

5. Dilema Sosial

a. Definisi Dilema Sosial

Dilema sosial adalah situasi yang menempatkan kepentingan pribadi berhadapan dengan kepentingan bersama. Dilema sosial terjadi karena kepentingan jangka pendek yang diinginkan individu berpotensi mengabaikan dampak jangka panjang yang melibatkan masyarakat. Cahyonowati dkk. (2023) menyelidiki kepatuhan pajak sebagai perilaku dilema sosial. Penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam situasi dilematis, individu diasumsikan masih berpikir rasional dan memaksimalkan utilitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Gangl et al.

(2015) yang menyatakan bahwa keputusan kepatuhan pajak menunjukkan adanya dilema sosial yaitu wajib pajak harus memilih antara meminimalkan pajak agar utilitas individu meningkat dalam jangka pendek atau memilih membayar pajak untuk kepentingan kolektif jangka panjang.

b. Indikator Dilema Sosial

Penelitian Cahyonowati (2023) dan Gangl (2015) menunjukkan bahwa kepercayaan, norma sosial, dan kekuasaan adalah faktor penjas dilema sosial terhadap kepatuhan pajak.

1) Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak

Keputusan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap pemerintah, fiskus, akuntan pajak, dan wajib pajak lainnya. Teori *slippery slope* menyebutkan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting dalam memahami asal mula keterlibatan masyarakat, kerja sama dengan pihak berwenang, dan kepatuhan. Sinergi hubungan antara wajib pajak dan pemerintah yang dilandasi rasa percaya akan terwujud dalam kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak dengan jujur (Kirchler et al., 2008).

Hal ini sejalan dengan penelitian Cahyonowati dkk. (2023) yang menyatakan bahwa konflik kepentingan ketika terjadi dilema sosial dalam membayar pajak dapat diatasi jika terdapat kepercayaan. Secara umum, wajib pajak akan bersedia membayar pajak hanya jika terdapat keadilan dan kepercayaan. Artinya, jika wajib pajak yakin bahwa wajib pajak lain juga membayar pajak, bahwa pajak yang dibayarkan tidak disalahgunakan melalui korupsi dan beban pajak didistribusikan secara adil (Lange et al., 2017).

Dalam situasi dilema sosial, kepercayaan relevan untuk mewujudkan sikap kooperatif. Kepercayaan terhadap interaksi ini diyakini mampu memberikan pedoman bagi wajib pajak dalam menentukan reaksinya terhadap dilema yang melatarbelakangi keputusan kepatuhan pajak.

2) Norma Sosial

Norma sosial mewakili perilaku yang diterima oleh sebagian besar wajib pajak. Apabila wajib pajak yakin jika kepatuhan merupakan perilaku yang biasa dilakukan dan menjadi kewajaran dalam kelompok mereka, maka mereka cenderung untuk melakukan tindakan yang sama. Kirchler et al. (2008) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa norma sosial yang terhubung dalam kelompok mampu meningkatkan perilaku kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Cahyonowati dkk. (2023) yang menyatakan bahwa norma sosial menjadi pedoman bagaimana individu berperilaku ketika menghadapi dilema dalam kepatuhan perpajakan.

3) Kekuasaan Legitimasi

Legitimasi adalah seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau tokoh Masyarakat. Kekuasaan legitimasi, melambangkan kewenangan formal untuk mengendalikan dan memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi. Menurut teori *slippery slope* dilema sosial dapat dipecahkan dan kepatuhan pajak dapat dijamin oleh kekuatan otoritas dan kepercayaan pada otoritas.

6. Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

a. Definisi Kepatuhan Pajak

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara." Perilaku kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam rangka memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam *Guidance Note Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance* tahun 2004, menyatakan bahwa hasil kepatuhan (*compliance outcomes*) adalah:

- a) *Registration*, yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.
- b) *Filing*, yaitu kepatuhan untuk mengisi laporan pajak.
- c) *Reporting*, yaitu kepatuhan untuk melaporkan laporan pajak.
- d) *Payment*, yaitu kepatuhan untuk membayar pajak.

b. Jenis-jenis Kepatuhan Pajak

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Asbar (2014) yaitu:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan Materil

Kepatuhan materil adalah wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai undang-undang perpajakan.

c. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria wajib pajak patuh sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17C ayat (2) UU KUP dan peraturan Menteri keuangan nomor 192/PMK.03/2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utangpajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut. Laporan keuangan harus disusun dalam bentuk Panjang (*long form support*), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiscal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan PPh. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik ditandatangani oleh akuntan public yang tidak sedang dalam pembinaan Lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hokum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Hasil Penelitian
1	Cahyonowati (2011) Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia	Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Dependen (Y): Kepatuhan Pajak</p> <p>Independen (X): Model Moral: 1. Variabel Sosial Kemasyarakatan 2. Variabel Demografi 3. <i>Deterrence Factor</i></p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika wajib pajak sudah baik secara moral maka dengan secara otomatis ia akan mematuhi peraturan perpajakan. Namun perlu digarisbawahi bahwa moral wajib pajak di Indonesia tidak tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan dari paksaan otoritas pajak yang berupa denda pajak.
2	Dwi Ratmono (2014) Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia	Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak	<p>Dependen (Y): Kepatuhan Pajak</p> <p>Independen (X): 1. Tingkat Denda 2. Keadilan Prosedural 3. Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis data menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa keadilan prosedural sebagai pemoderasi hubungan antara tingkat denda pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak tidak dapat didukung. • Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan pada otoritas merupakan sebuah variabel pemediasi penting pada efektifitas denda

				dan keadilan procedural.
3	Prasetyadi (2016) Perpustakaan PKN STAN	Analisis Pengaruh Orientasi Pelayanan, Pengetahuan Pajak, Dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak Di Indonesia	<p>Dependen (Y): Kepatuhan Pajak</p> <p>Independen (X): 1. Orientasi Pelayanan 2. Pengetahuan Pajak 3. Persepsi Korupsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan hak wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. • Persepsi korupsi pada administrasi pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. • Persepsi orientasi pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan hak wajib pajak. • Persepsi orientasi pelayanan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi korupsi pada administrasi pajak. • Persepsi orientasi pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak.
4	Nafi'a Fatmawati (2017)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Norma Subjektif, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	<p>Dependen (Y): Kepatuhan Pajak</p> <p>Independen (X): 1. Kesadaran Pajak 2. Norma Subjektif 3. Pendapatan Wajib Pajak</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak, norma subjektif, dan pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
5	Moh Yudi	<i>Previllage Tax</i>	Dependen (Y):	• Hasil analisis data

	Mahadianto dan Apri Dwi Astuti (2017) Jurnal Kajian Akuntansi	<i>Payer</i> , Sosialisasi Pajak Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan	Kepatuhan Pajak Independen (X): 1. <i>Privillage Tax Payer</i> 2. Sosialisasi Pajak 3. Kepercayaan Pada Otoritas Pajak	menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa <i>previllage tax payer</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat didukung. • Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat didukung. Hal ini kebanyakan responden menjawab netral atau tidak tahu akan sosialisasi pajak. • Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel kepercayaan terhadap otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela tidak dapat didukung.
6	Angelia Monica Saraswati (2018)	Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Dan Keadilan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Afektif Dan Kognitif Sebagai Variabel Pemediasi	Dependen (Y): Kepatuhan Pajak Independen (X): 1. Pelayanan Aparat Pajak 2. Keadilan Aparat Pajak Pemediasi (P): 1. Kepercayaan Afektif 2. Kepercayaan Kognitif	• Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan aparat pajak dan keadilan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. • Pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan afektif dan kognitif. • Selanjutnya, hasil kajian juga menunjukkan keadilan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan afektif

				dan kognitif kepercayaan afektif dan kognitif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
7	Lisa, Aminar, dan Mike (2019) Jurnal Benefita	Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dipersepsikan Melalui Faktor <i>Deterrence</i> , Keadilan Dan Norma Sosial	Dependen (Y): Kepatuhan Pajak Independen (X): 1. <i>Detternce</i> 2. Keadilan 3. Norma Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Deterrence factor</i>, keadilan prosedural, keadilan distributif, keadilan retributif secara parsial signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. • Sedangkan norma sosial ditemukan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
8	Salman Latief, Junaidin Zakaria, dan Mapparenta (2020)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen (Y): Kepatuhan Pajak Independen (X): 1. Kepercayaan Pada Pemerintah 2. Insentif Pajak 3. Manfaat Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. • Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. • Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jika insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

9	Annisa, Irani (2021)	Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Dan Penerapan <i>E-System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di DKI Jakarta)	<p>Dependen (Y): Kepatuhan Pajak</p> <p>Independen (X):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan Wajib Pajak 2. Penerapan <i>E-System</i> 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak dan penerapan <i>e-system</i> memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19. Dengan tingkat penghasilan wajib pajak dan penerapan sistem elektronik sangat membantu wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya.</p>
10	Natalis Sinulingga (2022) Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Peran Kepercayaan dalam Memediasi Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Dependen (Y): Kepatuhan Pajak</p> <p>Independen (X): Keadilan</p> <p>Mediasi (M): Kepercayaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi keadilan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. • Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. • Persepsi keadilan, yang dimediasi oleh

				kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat persepsi keadilan, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan.
11	Zainudin, Nugroho, dan Muamarah (2022) Jurnal Pajak Indonesia	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Dependen (Y): Kepatuhan Pajak Independen (X): Kepercayaan Kepada Pemerintah Intervening: Keadilan Pajak	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.
12	Nora Hilmia Primasari (2023)	Faktor Demografi Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Norma Sosial Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Dependen (Y): Kepatuhan Pajak Independen (X): Demografi: 1. Gender 2. Usia 3. Pendidikan Intervening: Norma Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengujian secara langsung menunjukkan bahwa usia berpengaruh positif terhadap norma sosial, dan norma sosial berpengaruh negatif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. • Hasil pengujian tidak langsung menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib

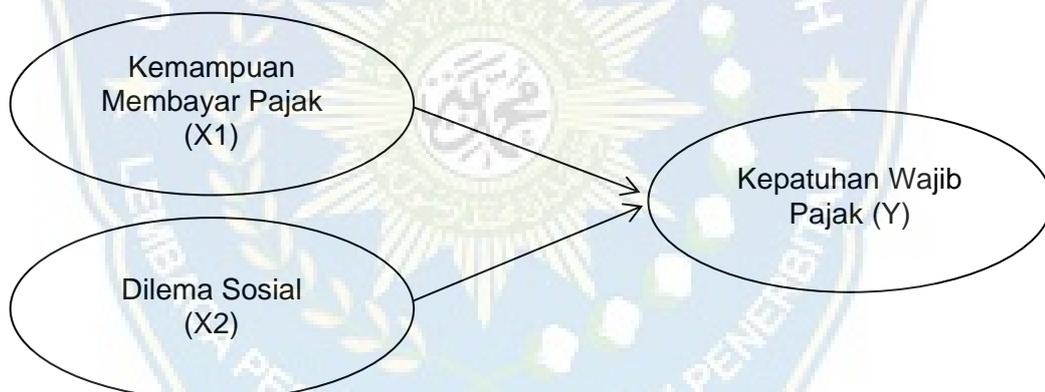
				<p>pajak dengan norma sosial sebagai variabel <i>intervening</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sedangkan gender dan usia tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dengan norma sosial sebagai variabel <i>intervening</i>.
13	Cahyonowati, Ratmono & Juliarto (2023)	<i>The Role Of Social Norms And Trust In Authority In Tax Compliance Dilemmas</i>	<p>Dependen (Y): Kepatuhan Pajak</p> <p>Independen (X): Dilema Sosial: 1. Norma Sosial 2. Kepercayaan 3. Variabel Demografi (Usia, Gender)</p>	<p>Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kepercayaan dan norma sosial dapat menjadi faktor penjelas dalam dilema pelaporan pajak. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa otoritas pajak perlu mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang melatarbelakangi wajib pajak untuk mencapai kejujuran dalam pelaporan pajak.</p>
14	Pricilia (2023)	Pengaruh Kemampuan Finansial, Kewajiban Moral, Dan Pemahaman Keuntungan Dalam Membayar Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Dependen (Y): Kepatuhan Pajak</p> <p>Independen (X): Dilema Sosial: 1. Kemampuan Finansial 2. Kewajiban Moral 3. Pemahaman</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial, kewajiban moral dan pemahaman keuntungan dalam membayar pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>

Sumber: Data yang diolah (2024)

C. Kerangka Pikir

Menurut Verboon dan Dikje (2010) upaya untuk memahami kepatuhan pajak telah berfokus pada dua pendekatan penelitian. Fokus pertama adalah pada bagaimana keinginan masyarakat untuk memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri. Fokus kedua adalah pendekatan dengan menggunakan analisis psikologis dan sosiologis dari kepatuhan pajak.

Dari pernyataan tersebut, penulis merumuskan variabel-variabel penelitian ke dalam kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir ini dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel-variabel penelitian. Berikut skema kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, teori, dan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Hubungan Kemampuan Membayar Pajak Dengan Kepatuhan Pajak

Kemampuan membayar pajak merupakan prinsip pemungutan pajak yang mengasumsikan bahwa beban pajak harus dipungut

berdasarkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Pricillia (2023) menunjukkan bahwa kemampuan finansial wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

H1: Kemampuan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Hubungan Dilema Sosial Dengan Kepatuhan Pajak

Sebagian besar wajib pajak orang pribadi berpendapat bahwa pembayaran pajak merupakan beban yang menjadi dilema ketika hal tersebut menjadi suatu kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah.

Gangl (2015) mengemukakan bahwa konsep kepatuhan sebagai dilema sosial yaitu berdasarkan pada kekuasaan dan kepercayaan. Hal ini sejalan dengan teori *slippery slope framework* yang menyatakan bahwa dilema sosial dapat diselesaikan dan kepatuhan pajak dapat dijamin dengan kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

Penelitian dari Cahyonowati (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan dan norma sosial dapat menjadi faktor penjas dalam dilema kepatuhan pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dilema sosial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H2: Dilema sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sekaran & Bougie (2016:2) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif mencakup setiap jenis riset yang didasarkan atas data dalam bentuk angka perhitungan persentase, dan perhitungan statistik lainnya yang dikumpulkan melalui pernyataan terstruktur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Singarimbun dan Effendi (2006:4-5) penelitian deskriptif digunakan untuk mengukur fenomena tertentu dengan cermat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017:142). Penulis membagikan lembar kuesioner kepada wajib pajak yang telah menyelesaikan urusannya di KPP Pratama Makassar Selatan. Selain itu, untuk memudahkan wajib pajak dalam mengisi kuesioner, penulis juga menyediakan link dan barcode google form untuk pengisian kuesioner.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Makassar Selatan Jl. Urip Sumoharjo KM. 04, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

2) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Mei s/d bulan Juni 2024.

C. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti yaitu yang berasal dari kuesioner (angket) yang disebar. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang didapat oleh peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berupa laporan penerimaan pajak, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, dan jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunannya sejak lima tahun terakhir di KPP Pratama Makassar Selatan.

Objek penelitian ini yaitu di KPP Pratama Makassar Selatan karena merupakan kantor pajak dengan jumlah wajib pajak terbanyak di kota Makassar, sehingga diharapkan dapat memperoleh populasi yang lebih luas. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.

D. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diteliti (Sekaran, 2006:121). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sampai periode 2023 adalah 231.583 WPOP. Dipilihnya seluruh WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan didasarkan karena jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan merupakan yang terbesar di Kota Makassar sehingga diharapkan data yang diperoleh lebih akurat.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:120). Sampel penelitian digunakan untuk mendapatkan gambaran dari populasi. Dalam mengambil besaran sampel, peneliti menggunakan rumus *slovin* dikarenakan sederhana, jumlah populasi diketahui, dan tingkat presesi yang digunakan beragam. Adapun rumus *slovin* adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot (e)^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Presentasi kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; $e = 10\% = 0,1$

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.(e)^2+1} = \frac{231.583}{(231.583 \times 0,1^2)+1} = 99,95$$

= 100 (dibulatkan)

Berdasarkan perhitungan di atas maka sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebesar 100 responden.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling*. Teknik ini tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling purposive*. Teknik ini menentukan sampel melalui pertimbangan tertentu dengan kriteria-kriteria yang dijadikan dasar untuk riset di dalam populasi, sedangkan orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria tidak dijadikan sampel (Kriyantono, 2010:158).

Kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Memiliki NPWP
2. Terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi (WPOP)

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel. Definisi operasional juga dapat membantu peneliti yang lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019).

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variable dependen (variabel terikat) dan dua variable independen (variabel bebas). Variabel dependen (Y) adalah variabel yang variasi nilainya tergantung pada variabel lain. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Pajak. Sementara variabel independen (X) adalah variabel yang variasi nilainya akan mempengaruhi variabel lain. Adapun variabel independen pada penelitian ini, yaitu Kemampuan Membayar Pajak (X1) dan Dilema Sosial (X2).

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kemampuan Membayar Pajak (X1) (Karlinah, 2022)	Dorongan dari dalam diri seorang wajib pajak yang dengan sadar, berdasarkan pertimbangan pikir, dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu.	a) Wajib Pajak menyiapkan ID Billing untuk membayar pajak. b) Wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai cara membayar pajak. c) Wajib Pajak mengetahui batas waktu pembayaran pajak. d) Wajib pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak. e) Wajib pajak menggunakan dana alokasi dalam membayar pajaknya.	Likert
Dilema Sosial (X2) (Cahyonowati, 2023)	Situasi dilematis yang menempatkan kepentingan pribadi untuk meminimalkan pajak agar utilitas meningkat, berhadapan dengan kepentingan bersama yang memilih untuk membayar pajak.	a) Kepercayaan kepada otoritas pajak - Pemerintah bisa dipercaya - Pemerintah memperhatikan semua kepentingan warga negara - Keuangan negara dikelola secara	Likert

		<p>transparansi dan tanggung jawab</p> <p>b) Norma Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teman mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak - Petugas pajak mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak - Pimpinan di tempat kerja mendorong saya untuk melakukan kepatuhan pajak <p>c) Kekuasaan otoritas pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otoritas pajak memiliki kekuatan di bidang perpajakan - Penyelidikan dilakukan oleh otoritas pajak - Tidak mudah melakukan penghindaran pajak 	
<p>Kepatuhan Pajak (Y)</p> <p>(OECD, 2004)</p>	<p>Tindakan wajib pajak dalam rangka memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>	<p>a) <i>Registration</i> Kepatuhan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak</p> <p>b) <i>Filling</i> Kepatuhan mengisi laporan pajak dengan benar dan tepat</p> <p>c) <i>Compute</i> Kepatuhan menghitung pajak terutang dengan benar dan apa adanya</p> <p>d) <i>Payment</i> Kepatuhan membayar pajak</p> <p>e) <i>Reporting</i> Kepatuhan melaporkan pajak</p>	Likert

Sumber: *Data yang diolah (2024)*

Penulis menggunakan definisi operasional variabel di atas sebagai petunjuk dalam penelitian ini. Indikator-indikator yang menjadi instrumen

variabel penelitian seperti yang telah disampaikan pada tabel 3.1 di atas akan diukur melalui kuisisioner menggunakan skala *likert*. Skala *likert* merupakan skala yang didasarkan pada rangking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Skala *likert* ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena terkait masalah yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Responden akan diminta untuk mengisi kuesioner dan jawaban dari kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan skala *likert* yang dibagi kedalam 5 kategori yakni sebagai berikut:

Tabel 3.2
Ketentuan Pengukuran Instrumen Penelitian

No.	Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Kurang Setuju (KS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data ialah suatu proses analisis data guna menyimpulkan dan memberi saran atau masukan yang mendukung dalam menentukan suatu keputusan. Sebelum data dianalisis untuk mendapatkan hasil yang baik, maka data harus mengalami proses pengujian terhadap kualitas data dan kesungguhan responden dalam menjawab kuesioner.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan pengolahan data atau *software* data yaitu aplikasi SPSS 25.0. Data yang didapat akan diuji menggunakan alat uji sebagai berikut:

1. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen pada penelitian ini meliputi:

1) Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017) uji validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi *pearson* dengan bantuan program SPSS 25.0 dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item tersebut dinyatakan valid.
- Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

2) Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017) uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat digunakan dengan aman karena instrumen yang reliabel akan akurat, dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda-beda dan dalam kondisi yang berbeda-beda pula (Pujiwidodo, 2016). Reliabilitas menunjuk tingkat keterandalan sesuatu. Pada penelitian ini pengujian reliabilitas kuesioner menggunakan alat bantu program SPSS 25.0 dengan

kriteria jika setiap variabel memberikan nilai *cronbach's alpha* > 0,60 maka dapat dikatakan variabel itu reliabel atau andal.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model yang terbaik, dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, serta konsisten, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik (Juliandi et al., 2014). Sebelum melakukan analisa regresi berganda dan pengujian hipotesis, maka harus melakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linier yang baik.

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi dalam penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik merupakan model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal sehingga layak dan dapat dilakukan pengujian secara statistik (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan cara *kolmogorov smirnov* pada SPSS 25.0. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal.

- Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka residual tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi membentuk korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antara variabel independen dan bebas dari gejala multikolinieritas. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Secara umum nilai toleransi yang dipakai adalah nilai 1 dan nilai VIF adalah 10. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* $> 0,10$, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
- Jika nilai VIF > 10 atau nilai *tolerance* $< 0,10$, maka dinyatakan terjadi multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya konstan maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau yang tidak mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit), maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

- Jika tidak terdapat adanya titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, dan titik-titik pada *scatterplot* di atas menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y. Hal tersebut artinya menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

G. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi dipergunakan untuk menggambarkan garis yang menunjukkan arah hubungan antar variabel, serta dipergunakan untuk melakukan prediksi. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

H. Uji Hipotesis

Menurut Arifin (2017:17), uji hipotesis dilakukan dalam menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan membuat kesimpulan menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pengujian hipotesis dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan tepat dalam suatu hipotesis yang diajukan.

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau disimbolkan dengan R^2 berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.

Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1, artinya variabel-variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Sedangkan, nilai determinasi mendekati 0, artinya variabel-variabel independen hanya memberikan sedikit informasi untuk menjelaskan variasi variabel dependennya. Menurut Sugiyono (2016) nilai 0,00-0,199 (sangat rendah), 0,20-0,399 (rendah), 0,40-0,599 (sedang), 0,60-0,799 (kuat), dan 0,80-1,00 (sangat kuat)

2) Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)

Menurut Ghozali (2021) uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dengan mengambil nilai sig. 0,05 ($\alpha = 5\%$). Langkah-langkah uji statistik t:

(a) Menentukan hipotesis statistik:

- Hipotesis (dugaan) dalam uji t pertama adalah:

$H_0 = X_1$ tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

$H_1 = X_1$ berpengaruh signifikan terhadap Y

- Hipotesis (dugaan) dalam uji t kedua adalah:

$H_0 = X_2$ tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

$H_2 = X_2$ berpengaruh signifikan terhadap Y

(b) Mengambil keputusan dengan kriteria berikut :

- Jika nilai signifikan $< 0,05$, berarti satu variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikan $> 0,05$, berarti satu variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara I di Jalan Urip Sumohardjo KM. 4 Makassar. Terhitung mulai tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KPP Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah penambahan "Pratama", sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan tersebut, seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Makassar Selatan

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

c. Visi KPP Pratama Makassar Selatan

Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.

d. Misi KPP Pratama Makassar Selatan

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.

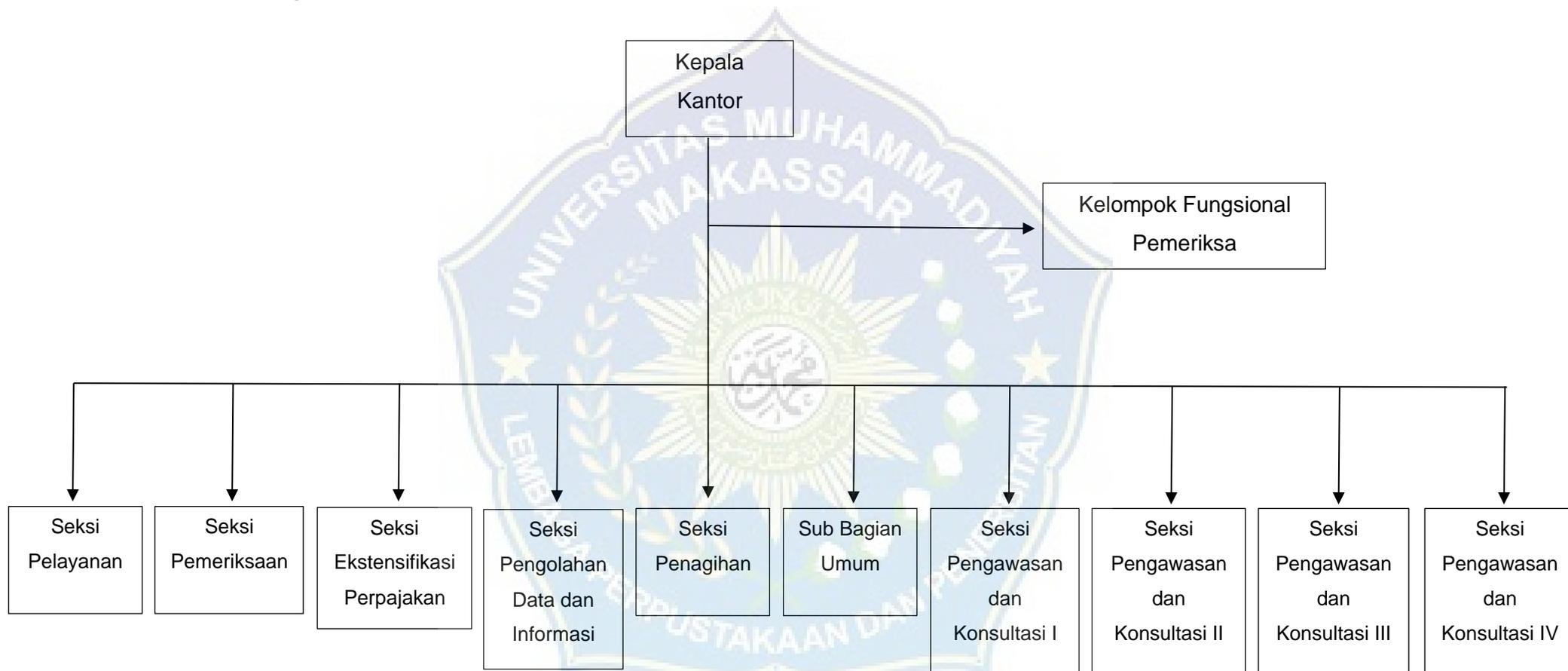
3. Nilai-nilai Kementerian Keuangan

Tabel 4.1

Nilai-nilai Kementerian Keuangan

Nilai	Makna	Perilaku Utama
Integritas	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	<ul style="list-style-type: none"> • Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya • Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
Profesionalisme	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas • Bekerja dengan hati
Sinergi	Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati • Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik
Pelayanan	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.	<ul style="list-style-type: none"> • Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan • Bersikap proaktif dan cepat tanggap
Kesempurnaan	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perbaikan terus menerus • Mengembangkan inovasi dan kreativitas

4. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verifikasi Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum

- Kepala Sub Umum dibantu oleh:
- Kepala Urusan Keuangan
- Kepala Urusan Rumah Tangga
- Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

2) Seksi Teknis, terdiri dari:

- Seksi Pelayanan
- Seksi PDI
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi (1-4)
- Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- Seksi Pemeriksaan & Fungsional Pemeriksaan Pajak
- Seksi Penagihan

5. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Selatan

a. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT.

Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah:

- 3) Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- 5) Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
- 6) Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh

b. Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja.

d. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

e. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis kepada Wajib Pajak.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II s/d IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

h. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

6. Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 (tiga) KPP di kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi yaitu:

- a. Rappocini
- b. Makassar
- c. Panakkukang
- d. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar.

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul dengan Kecamatan Panakkukang sebesar 32 persen, Kecamatan Rappocini 17 persen, dan terakhir Kecamatan Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan yang sudah memiliki NPWP. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner melalui lembar kuesioner atau link *google form*. Distribusi sampel data dapat dilihat dalam pengambilan sampel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Distribusi Sampel Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang digunakan	63	63%

Sumber: Data yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas tentang distribusi sampel kuesioner menunjukkan bahwa dari 100 kuesioner yang disebar kepada responden, terdapat 63 kuesioner yang kembali dan layak untuk dianalisis. Di bawah ini akan dideskripsikan karakteristik responden meliputi jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai karakteristik responden yang sempat terjangkau dalam penelitian ini.

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	35	55,6%
Perempuan	28	44,4%
Total	63	100%

Sumber: Data yang diolah (2024)

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 35 orang atau sebanyak 55,6%, sedangkan jumlah yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 28 orang atau sebanyak 44,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang terlibat dalam penelitian ini responden dengan berjenis kelamin laki-laki.

b. Umur

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
21-30	27	42%
31-40	18	29%
41-50	12	20%
51-60	6	9%
>60	0	0%
Total	63	100%

Sumber: Data yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa responden berdasarkan tingkat umur didominasi oleh umur 21-30 tahun dengan persentase 42%, kemudian disusul dengan responden umur 31-40 tahun dengan persentase 29%, selanjutnya responden dengan umur 41-50 tahun dengan persentase 20%, dan terakhir responden umur 51-60 tahun dengan persentase 9%.

c. Pendidikan

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
SMA	5	8%
D3	9	14,2%
S1	45	71,4%
S2	4	6,4%
S3	0	0%
Total	63	100%

Sumber: Data yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden berdasarkan pendidikan didominasi oleh pendidikan S1 dengan persentase sebesar

71,4%, kemudian disusul dengan pendidikan D3 dengan persentase 14,2%, selanjutnya responden dengan pendidikan SMA dengan persentase 8%, dan terakhir responden dengan pendidikan S2 dengan persentase 6,4%.

d. Pekerjaan

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
PNS	6	9,5%
Karyawan	32	50,7%
Wiraswasta	9	14,2%
Pensiunan	0	0%
Lainnya	16	25,6%
Total	63	100%

Sumber: *Data yang diolah (2024)*

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa responden yang terlibat dalam penelitian ini berdasarkan status pekerjaan terdiri dari 9,5% PNS, 50,7% karyawan, 14,2% wiraswasta, dan 25,6% pekerjaan lainnya. Dari data responden berdasarkan status pekerjaan dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak didominasi oleh karyawan yaitu sebanyak 32 orang dengan persentase 50,7%.

C. Analisis Data Deskriptif Variabel

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 63 responden melalui penyebaran kuesioner. Berikut ini hasil deskripsi masing-masing variabel.

1. Deskripsi Variabel Kemampuan Membayar Pajak (X1)

Kemampuan membayar pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak berkontribusi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kemampuan membayar pajak identik dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Berikut ini distribusi frekuensi 5 jawaban variabel atas kemampuan membayar pajak:

Tabel 4.7

Tanggapan Responden Mengenai Variabel X1

No.	Pernyataan		Skor					Jumlah
			SS	S	N	TS	STS	
1	Menyiapkan ID Billing untuk membayar pajak	F	19	35	9	0	0	262
		Skor	95	140	27	0	0	
2	Mencari informasi mengenai cara membayar pajak	F	38	23	2	0	0	288
		Skor	190	92	6	0	0	
3	Mengetahui batas waktu pembayaran pajak	F	17	29	15	2	0	250
		Skor	85	116	45	4	0	
4	Mengalokasikan dana untuk membayar pajak	F	23	34	6	0	0	269
		Skor	115	136	18	0	0	
5	Menggunakan dana alokasi dalam membayar pajak	F	18	40	5	0	0	265
		Skor	90	160	15	0	0	
Jumlah Skor							1.334	

Sumber: Data yang diolah (2024)

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan "Sangat Setuju" terhadap item-item pengukur kemampuan membayar pajak. Tanggapan responden terhadap variabel kemampuan membayar pajak menunjukkan jumlah skor 1.334 dengan skor tertinggi sebesar 288 yang terdapat pada pernyataan nomor 2 yaitu wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai cara membayar pajak.

2. Deskripsi Variabel Dilema Sosial (X2)

Dilema sosial terhadap kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memilih untuk memaksimalkan pendapatannya dengan

memimalkan pembayaran pajak atau memilih untuk membayar pajak demi kepentingan kolektif jangka panjang. Dilema sosial dalam perpajakan identik dengan isu kepercayaan, norma sosial dan kekuasaan otoritas. Berikut distribusi frekuensi 9 jawaban variabel atas dilema sosial:

Tabel 4.8

Tanggapan Responden Mengenai Variabel X2

No.	Pernyataan		Skor					Jumlah
			SS	S	N	TS	STS	
1	Pemerintah bisa dipercaya	F	6	25	26	6	0	220
		Skor	30	100	78	12	0	
2	Pemerintah memperhatikan semua kepentingan warga	F	5	23	28	7	0	215
		Skor	25	92	84	14	0	
3	Keuangan negara dikelola dengan transparansi dan tanggung jawab	F	3	28	25	7	0	216
		Skor	15	112	75	14	0	
4	Teman mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak	F	5	38	19	1	0	226
		Skor	15	152	57	2	0	
5	Petugas pajak mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak	F	25	35	2	1	0	276
		Skor	125	140	6	2	0	
6	Pimpinan tempat saya bekerja mendorong saya melakukan perilaku kepatuhan pajak	F	13	42	8	0	0	257
		Skor	65	168	24	0	0	
7	Otoritas pajak memiliki kekuatan di bidang perpajakan	F	29	30	4	0	0	277
		Skor	145	120	12	0	0	
8	Penyelidikan terkait pajak dilakukan oleh otoritas pajak	F	33	26	4	0	0	281
		Skor	165	104	12	0	0	
9	Tidak mudah menghindari pajak	F	35	26	2	0	0	285
		Skor	175	104	6	0	0	
Jumlah Skor							2.253	

Sumber: Data yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan “Sangat Setuju” terhadap item-item pengukur dilema sosial. Tanggapan responden terhadap variabel dilema

sosial menunjukkan jumlah skor 2.253 dengan skor tertinggi sebesar 285 yang terdapat pada pernyataan nomor 9 yaitu wajib pajak tidak mudah menghindari pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden menganggap item-item pernyataan tersebut memang menjadi dilema yang dirasakan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

3. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pajak (Y)

Perilaku kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam rangka memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak identik dengan kedisiplinan wajib pajak. Berikut ini distribusi frekuensi 5 jawaban variabel kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4.9

Tanggapan Responden Mengenai Variabel Y

No.	Pernyataan		Skor					Jumlah
			SS	S	N	TS	STS	
1	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	F	23	40	0	0	0	275
		Skor	115	160	0	0	0	
2	Mengisi formulir pajak dengan benar dan tepat	F	44	19	0	0	0	296
		Skor	220	76	0	0	0	
3	Menghitung pajak penghasilan dengan benar	F	27	36	0	0	0	279
		Skor	135	144	0	0	0	
4	Membayar sebelum tanggal jatuh tempo	F	41	22	0	0	0	293
		Skor	205	88	0	0	0	
5	Melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu	F	43	20	0	0	0	295
		Skor	215	80	0	0	0	
Jumlah Skor							1.438	

Sumber: Data yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan “Sangat Setuju” terhadap item-item

pengukur kepatuhan wajib pajak. Tanggapan responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan jumlah skor 1.438 dengan skor tertinggi sebesar 296 yang terdapat pada pernyataan nomor 2 yaitu wajib pajak mengisi formulir pajak dengan benar dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa responden menganggap item-item pernyataan tersebut memang sesuai dengan tindakan kepatuhan wajib pajak.

D. Hasil Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen dapat mengukur suatu konsep tertentu. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.

Uji validitas dilakukan terhadap masing-masing item pernyataan yang membentuk variabel penelitian. Dalam penelitian ini, uji validitas diukur dengan menggunakan korelasi pearson. Jika korelasi pearson antara masing-masing pernyataan variabel dengan skor total menghasilkan nilai korelasi (r_{hitung}) > dari r_{tabel} ($\alpha = 5\%$ atau 0,05), maka item variabel dikatakan valid. Nilai r_{tabel} ($n = 63$, $\alpha = 5\%$) adalah 0,2441. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan SPSS 25.0.

Berikut ini adalah hasil uji validitas yang telah diolah oleh peneliti berdasarkan data kuesioner yang diperoleh:

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas

No	Variabel/ Indikator	R Hitung	R Tabel	Sig.(2- tailed	α	Keterangan
1	Kemampuan Membayar Pajak (X1)					
	X1.1	0,661	0,2441	0,000	0,05	Valid
	X1.2	0,677	0,2441	0,000	0,05	Valid
	X1.3	0,758	0,2441	0,000	0,05	Valid
	X1.4	0,741	0,2441	0,000	0,05	Valid
	X1.5	0,710	0,2441	0,000	0,05	Valid
2	Dilema Sosial (X2)					
	X2.1	0,733	0,2441	0,000	0,05	Valid
	X2.2	0,718	0,2441	0,000	0,05	Valid
	X2.3	0,740	0,2441	0,000	0,05	Valid
	X2.4	0,643	0,2441	0,000	0,05	Valid
	X2.5	0,606	0,2441	0,000	0,05	Valid
	X2.6	0,521	0,2441	0,000	0,05	Valid
	X2.7	0,545	0,2441	0,000	0,05	Valid
	X2.8	0,501	0,2441	0,000	0,05	Valid
	X2.9	0,628	0,2441	0,000	0,05	Valid
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					
	Y.1	0,629	0,2441	0,000	0,05	Valid
	Y.2	0,595	0,2441	0,000	0,05	Valid
	Y.3	0,748	0,2441	0,000	0,05	Valid
	Y.4	0,728	0,2441	0,000	0,05	Valid
	Y.5	0,634	0,2441	0,000	0,05	Valid

Sumber: Data yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel kemampuan membayar pajak, dilema sosial, dan kepatuhan wajib pajak memenuhi persyaratan karena nilai korelasi $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} . Semua indikator yang digunakan untuk mengukur

variabel-variabel dalam penelitian ini valid karena nilai korelasinya lebih besar dari 0,2441.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat digunakan dengan aman karena instrumen yang reliabel akan akurat, dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda-beda dan dalam kondisi yang berbeda-beda pula. Jika setiap variabel memberikan nilai *cronbach's alpha* > 0,60 maka dapat dikatakan variabel itu reliabel atau andal.

Tabel 4.11

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel/ Indikator	Alpha Hitung	Alpha Croncbach	Keterangan
1	Kemampuan Membayar Pajak	0,748	0,60	Reliabel
2	Dilema Sosial	0,810	0,60	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,689	0,60	Reliabel

Sumber: Data yang diolah (2024)

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa variabel kemampuan membayar pajak, variabel dilema sosial dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai alpha di atas 0.60. Dengan demikian item-item pernyataan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel sehingga item masing-masing variabel tersebut andal/layak.

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi dalam penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. Model

regresi yang baik merupakan model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal sehingga layak dan dapat dilakukan pengujian secara statistic. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan cara *kolmogorov smirnov* pada SPSS. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal.

Tabel 4.12

Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,16351896
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,069
	Negative	-,070
Test Statistic		,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.12 terkait hasil uji normalitas, diketahui bahwa nilai signifikansi $0,200 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut terdistribusi dengan normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi membentuk korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antara variabel independen dan bebas dari gejala multikolinearitas. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Secara umum nilai toleransi yang dipakai adalah nilai 1 dan nilai VIF adalah 10.

Tabel 4.13

Hasil Uji Multikolinearitas

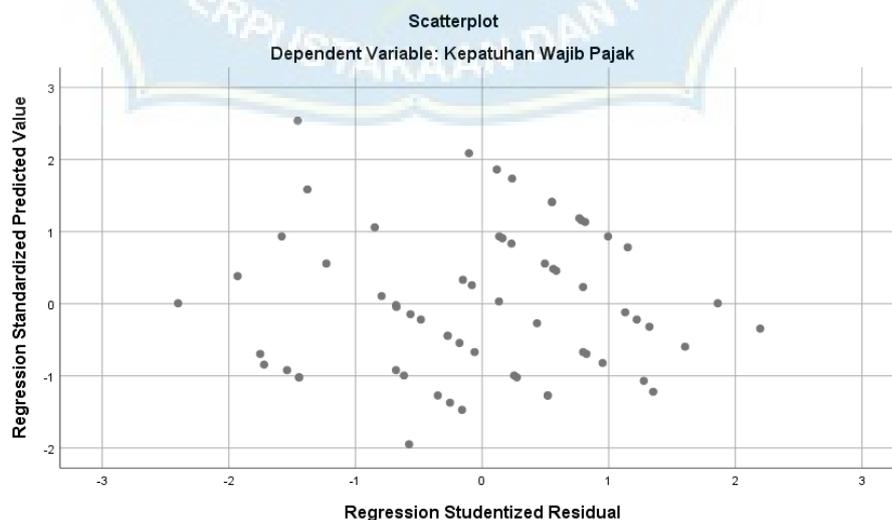
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10,927	1,699		6,433	,000		
X1	,139	,071	,198	1,958	,055	,856	1,169
X2	,249	,043	,589	5,819	,000	,856	1,169

Sumber: Data yang diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.13, dapat diketahui bahwa variabel independen mempunyai nilai *tolerance* 0,856 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 1,169 lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen sehingga model regresi ini layak dipakai untuk penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot* atau sering juga disebut dengan grafik sebar, adalah penggunaan titik-titik untuk mewakili nilai untuk dua variabel numerik yang berbeda.



Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2 terkait grafik *scatterplot* terlihat pola persebaran data tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur, dan titik-titik pada *scatterplot* di atas menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi dipergunakan untuk menggambarkan garis yang menunjukkan arah hubungan antar variabel. Berikut hasil regresi berganda:

Tabel 4.14

Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10,927	1,699		6,433	,000		
X1	,139	,071	,198	1,958	,055	,856	1,169
X2	,249	,043	,589	5,819	,000	,856	1,169

Sumber: Data yang diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4.14 terkait analisis regresi berganda dapat diketahui bahwa variabel kemampuan membayar pajak dan variabel dilema sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan regresi diatas dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 + b_2 = 10,927 + 0,139 + 0,249$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai a sebesar 10,927 merupakan nilai konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan wajib pajak belum dipegaruhi oleh variabel independen yaitu kemampuan membayar pajak (X_1) dan dilema sosial

(X_2). Hal ini mengasumsikan bahwa apabila nilai variabel-variabel independen konstan, maka variabel dependen adalah sebesar 10,927.

- b. b_1 (nilai koefisien regresi X_1) sebesar 0,139 bernilai positif, berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel kemampuan membayar pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,139 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini berarti apabila tingkat kemampuan membayar pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.
- c. b_2 (nilai koefisien regresi X_2) sebesar 0,249 bernilai positif, berarti apabila tingkat dilema sosial meningkat, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. Setiap kenaikan 1 satuan variabel dilema sosial akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,249 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau disimbolkan dengan R^2 berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1 maka pengaruh variabel semakin kuat.

Tabel 4.15

Hasil Uji R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	,689 ^a	,474	,457	1,183

Sumber: Data yang diolah (2024)

Pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa hasil uji R^2 pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,474 atau sama dengan 47,4%. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengaruh yang disumbangkan oleh variabel independen (kemampuan membayar pajak, dilema sosial) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 47,4%. Sedangkan sisanya 52,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikansi T

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dengan mengambil nilai sig 0,05. Berikut ini hasil uji t yang sesuai dengan hasil analisis regresi:

Tabel 4.16

Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,927	1,699		6,433	,000
X1	,139	,071	,198	1,958	,055
X2	,249	,043	,589	5,819	,000

Sumber: Data yang diolah (2024)

Dari persamaan tabel 4.16 maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hasil uji t pengaruh kemampuan membayar pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak yang tersaji pada tabel 4.15 diperoleh hasil t_{hitung} sebesar $1,985 <$ dari t_{tabel} 2,000 dan nilai signifikansi sebesar $0,055 >$ $0,005$ ($\alpha = 5\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 **ditolak**. Ini berarti bahwa kemampuan membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Hasil uji t pengaruh dilema sosial (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak yang tersaji pada tabel 4.15 diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 5,819 > dari t_{tabel} 2,000 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$ ($\alpha = 5\%$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 **diterima**. Ini berarti bahwa dilema sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,198 dan nilai signifikan t 0,055 lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikan > dari 0,05 maka H_1 **ditolak**. Ini berarti bahwa kemampuan membayar pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seseorang yang memiliki kemampuan membayar pajak tidak dapat menjamin terjadinya kepatuhan wajib pajak. Kemampuan membayar pajak tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak karena tindakan kepatuhan pajak tidak tergantung pada seberapa mampu seseorang dalam membayar pajaknya, tetapi diperlukan adanya faktor pendukung lain dari diri wajib pajak itu sendiri seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, motivasi dalam diri wajib pajak, persepsi, dan keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak dapat mengukur tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Meskipun prinsip pemungutan pajak menekankan bahwa pajak terutang yang dibebankan kepada wajib pajak harus berdasarkan pada kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun masih ada saja wajib pajak yang enggan untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun mereka menyadari bahwa finansialnya sudah mampu untuk menanggung beban pajak tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal. Maka dari itu selain kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak, diperlukan juga adanya kesadaran dan pemahaman dari wajib pajak tentang betapa pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan di suatu negara.

Teori *slippery slope* menyatakan bahwa tindakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kekuatan dari otoritas dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas. Teori ini menekankan bahwa kepatuhan pajak dapat terjadi karena adanya paksaan dari pemerintah dan sikap sukarela dari wajib pajak itu sendiri. Sehingga berdasarkan teori ini dapat diketahui bahwa tindakan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dari wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karlinah (2022) yang menyatakan bahwa kemampuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa wajib pajak cenderung tidak mengalokasikan dana untuk membayar pajak sehingga pembayaran pajak tidak tercukupi. Hal ini yang membuat wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Terdapat argumen lain yang juga mendukung penelitian ini, yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Arsyi (2022) yang

menyatakan bahwa variabel kemampuan membayar tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Dilema Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilema sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,589 dan nilai signifikan t 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jika nilai signifikan $<$ dari 0,05 maka H_2 **diterima**. Ini berarti bahwa dilema sosial yang dirasakan oleh wajib pajak mampu mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Dilema sosial dalam perpajakan merupakan situasi yang menempatkan kepentingan pribadi wajib pajak berhadapan dengan kepentingan umum yang dimanfaatkan bersama. Keputusan kepatuhan pajak menunjukkan adanya dilema sosial yaitu wajib pajak harus memilih antara meminimalkan pajak agar utilitas individu meningkat dalam jangka pendek atau memilih membayar pajak untuk kepentingan kolektif jangka panjang. Pada intinya kepatuhan pajak menimbulkan adanya dilema sosial bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilema sosial mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak jika dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek kepercayaan terhadap pemerintah, norma sosial dan kekuasaan atau tekanan. Apabila wajib pajak merasa bahwa pemerintah tidak menggunakan dana pajak secara efisien atau terjadinya korupsi, maka mereka lebih cenderung melakukan penghindaran pajak. Ketidakpercayaan ini menciptakan dilema sosial dimana kepatuhan

individu dianggap tidak berharga. Begitupun dengan aspek norma sosial, jika suatu kelompok tidak mendukung kepatuhan pajak maka hal ini juga dapat menjadi dilema bagi wajib pajak lain untuk ikut serta menjadi bagian dari kelompok tersebut. Selain daripada itu aspek kekuasaan juga dapat menjadi alasan terjadinya dilema sosial terhadap kepatuhan wajib pajak, apabila kekuasaan otoritas dianggap adil dan menyentuh berbagai lapisan, maka dilema sosial dalam perpajakan juga dapat teratasi.

Hal tersebut sesuai dengan teori *slippery slope* yang dikemukakan oleh Kirchler (2008) yang menyatakan bahwa kepercayaan, norma sosial, dan kekuasaan dapat menjadi faktor penjas adanya dilema dalam kepatuhan wajib pajak. Selama wajib pajak percaya terhadap otoritas, wajib pajak meyakini bahwa kepatuhan pajak merupakan perilaku yang sering dilakukan oleh banyak orang, dan wajib pajak mengakui kewenangan dan kekuasaan otoritas, maka dilema sosial terhadap kepatuhan pajak akan dapat teratasi. Hal ini berarti bahwa faktor kepercayaan, norma sosial, dan kekuasaan mempengaruhi adanya dilema sosial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2023) yang menyatakan bahwa kepercayaan dan norma sosial dalam situasi dilema sosial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sesuai dengan argumen yang dikeluarkan oleh Gangl (2015) yang mengemukakan bahwa konsep dilema sosial yaitu kepercayaan dan kekuasaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dilema sosial dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kemampuan membayar pajak dan dilema sosial terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,198 dan nilai signifikan t 0,055 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak dapat menjamin wajib pajak tersebut akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kemampuan membayar pajak tidak dapat secara langsung mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak karena dibutuhkan faktor pendukung lain yang terdapat dari diri wajib pajak itu sendiri seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman dan keadilan.
2. Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 0,589 dan nilai signifikan t 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti dilema sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa situasi dilema sosial terhadap perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Keputusan kepatuhan pajak menunjukkan adanya dilema sosial yaitu wajib pajak harus memilih antara meminimalkan pajak agar utilitas individu meningkat dalam jangka pendek atau memilih membayar pajak untuk kepentingan kolektif jangka panjang. Dilema sosial

mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak jika dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek kepercayaan terhadap pemerintah, norma sosial dan kekuasaan atau tekanan.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Otoritas Pajak

Petugas pajak perlu untuk terus mengembangkan inovasi dan kebijakan untuk menarik perhatian wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Karena kemampuan membayar yang dimiliki oleh wajib pajak tidak dapat menjamin kepatuhan wajib pajak itu sendiri tanpa dibarengi dengan kesadaran dan pemahaman pengetahuan perpajakan. Selain itu petugas pajak juga harus mampu menanamkan kepercayaan kepada masyarakat dengan terus menjunjung integritas sehingga dilema sosial yang dirasakan oleh wajib pajak dapat teratasi.

2. Bagi Peneliti

a) Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menambah atau mengganti variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

b) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengait lebih banyak jumlah responden dan memperluas sampel penelitian, bukan hanya pada satu kantor pelayanan pajak. Hal ini bertujuan agar dapat memperoleh hasil penelitian dengan tingkat yang lebih bermanfaat bagi praktisi dan pengembang teori perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreoni, J., B. Erard, dan J. Feinstein. (1998). *Tax Compliance. Journal of Economic Literature* 36 No. 2: 818-860.
- Alm, J., Schulze, W. D., von Bose, C., & Yan, J. (2019). *Appeals to social norms and taxpayer compliance. Southern Economic Journal*, 86(2), 638–666.
- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Elizabeth Aloo, Omolo. (2012). *The Determinants Of Tax Revenue In Kenya*. Skripsi. Univesity Supervisor.
- Arsyil, Abyan. (2022). *Pengaruh Kemampuan Membayar Tarif Pajak, Metode Pembayaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemilik Kendaraan Bermotor Di Kota Jakarta Pusat)*. Universitas Negeri Jakarta.
- Asbar, Khairina. (2014). *Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru*. JOM FEKON Vol. 1 No. 2. Universitas Riau.
- Cahyonowati, Ratmono, Juliarto. (2023). *The role of social norms and trust in authority in tax compliance dilemmas*. *Cogent Business & Management*, 10:1, 2174084.
- Fatmawati. (2017). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Norma Subjektif, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Gangl, Katharina, Eva Hofmann, dan Erich Kirchler. (2015). *Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust*. *New Ideas in Psychology* 37: 13-23.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25 (9th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heider, Fritz. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley
- Juliandi, dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. UMSU PRESS. Medan.
- Karlinah, Lady. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Barat*. Universitas Esa Unggul.

- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework*. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.
- Kriyantono, Rachmat. (2010). *Teknik praktis riset komunikasi: disertai contoh praktis riset media, public relation, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Jakarta: Kencana
- Lange, P. A. M., Van, Rockenbach, B., & Yamagishi, T. (2017). *Trust in social dilemmas*. Oxford University Press.
- Lisa, Amingar, Mike. (2019). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dipersepsikan Melalui Faktor Deterrence, Keadilan dan Norma Sosial*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Padang.
- Mangoting, Jatopurnomo, Cindy, Yenni. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. *Journal Tax and Accounting Review*, Vol.1 (1).
- Mahadianto, Astuti. (2017). *Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan*. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1, (1), 2017, 77-86. Universitas Swadaya Gunung Jati.
- Mardiasmo, Soemitro. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit: Andi. Jakarta.
- OECD. (2004). *"Complilancel Rilsk Managemelnt: Managilng and IlmprovilngTaxComplilancel."* Celntrel for Tax Polilcy and Admilnilstratilon (October): 1-73.
- Pricilia. (2023). *Pengaruh Kemampuan Finansial, Kewajiban Moral, Dan Pemahaman Keuntungan Dalam Membayar Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Multi Data Palembang.
- Ratmono (2014). *Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 18 No. 1, Juni 2014: 42-64.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Robbins Timothy, Stephen. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinulingga, Natalis (2022). *Peran Kepercayaan dalam Memediasi Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Volume 2 No. 5 September 2022 (277-288).
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach, 7th Edition*. New Jersey: Wiley.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (2006). *“Metode Penelitian Survei”*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, Hidayat. (2019). *Dilema sosial: Representasi sosial tentang pajak pada Aparatur Sipil Negara*. *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 17, No. 02, 65-74. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Vanessa dan Priyono Hari Adi. (2009). *“Dampak Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”*. Sinopsium Nasional Perpajakan II.
- Van Vugt, M. (2002). *Central, Individual or Collective Control? Social Dilemma Strategies for Natural Resources Management*. *American Behavioral Scientist*, 45, 783-800.
- Verboon, P, Van Dijke, M. (2010). *Trust in Authorities as a Boundary Condition to Procedural Fairness Effects on Tax Compliance*. *Journal of Economic Psychology* 31 (1): 80-91.
- <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/prinsip-pajak/> diakses pada tanggal 26 Januari 2024.
- <https://news.ddtc.co.id/mengurai-keberadaan-prinsip-keadilan-dalam-sistem-pajak-39172> diakses tanggal 26 Januari 2024.
- <https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 09 Mei 2024
- <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/30216/apa-itu-ability-to-pay> diakses pada tanggal 18 Juni 2024



LAMPIRAN 1

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4215/05/C.4-VIII/V/1445/2024 06 May 2024 M
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 27 Syawal 1445
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
 Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 307/05/A.2-II/V/45/2024 tanggal 6 Mei 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SALSABILA
 No. Stambuk : 10573 1117922
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGARUH KEMAMPUAN MEMBAYAR PAJAK DAN DILEMA SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Mei 2024 s/d 10 Juni 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

 M. Arief Muhsin, M.Pd.
 NBM 1127761

LAMPIRAN 2

IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 10947/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.
Lampiran : - Kepala Kantor KPP Pratama
Perihal : Izin penelitian Makassar selatan

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4215/05/C.4-VIII/V/1445/2024 tanggal 06 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SALSABILA
Nomor Pokok : 105731117922
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH KEMAMPUAN MEMBAYAR PAJAK DAN DILEMA SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 10 Mei s/d 10 Juni 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

LAMPIRAN 3

PERSETUJUAN IZIN RISET

8/3/24, 12:09 AM

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Salsabila <salsa88sep2018@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

20 Mei 2024 pukul 08.36

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: salsa88sep2018@gmail.com

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**
KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 GEDUNG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK, MAKASSAR 90232
TELEPON 0411-425220-456131, 456132; FAKSIMILE 0411-456132, 456857; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id



Nomor : S-120/RISET/WPJ.15/2024 Makassar, 20 Mei 2024
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Salsabila

Kompleks Mangasa Permai Blok X1 No.3, Makassar

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02603-2024** pada **16 Mei 2024**, dengan informasi:

NIM : 7308165505010002
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Riset : Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak Dan Dilema Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Makassar Selatan)

Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Makassar Selatan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **20 Mei 2024 s/d 19 November 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Sunarko

LAMPIRAN 4**SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER PENELITIAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden Wajib Pajak

Di KPP Pratama Makassar Selatan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak dan Dilema Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan), bersama kuesioner ini saya :

Nama : Salsabila
NIM : 105731117922
Program Studi : S1 Akuntansi
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi seluruh pernyataan kuesioner ini dengan sejujurnya dan sebagaimana mestinya sesuai dengan kode etik penelitian ilmiah. Semua identitas Bapak/Ibu/Saudara/i akan dijaga kerahasiannya dan informasi yang didapat dalam kuesioner ini hanya akan digunakan sebagai bahan akademis.

Demikianlah permohonan ini, atas waktu dan kesediannya saya ucapkan terima kasih. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk kita semua utamanya dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia khususnya di Kota Makassar.

Hormat Saya,
Salsabila

Bagian I : Data Responden

Dimohonkan untuk mengisi data dibawah ini dengan lengkap dan benar serta berikan tanda check list (√) dalam kolom yang telah disediakan.

1. Nama/ Inisial :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia : 21-30 Tahun 31-40 Tahun
 41-50 Tahun 51-60 Tahun
 >60 Tahun
4. Apakah Memiliki NPWP : Ya Tidak
5. Tingkat Pendidikan : SMA D3 S1 S2
6. Pekerjaan : PNS Wiraswasta
 Karyawan Pensiunan
 Lainnya

Bagian II : Petunjuk Pengisian Kuesioner

Angket diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.

1. Beri tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Dalam menjawab pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, tidak ada jawaban yang dikosongkan.
3. Tiap pertanyaan hanya diperkenankan satu jawaban.

Keterangan :

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

A. Kepatuhan Pajak (Y)

Pernyataan Variabel Kepatuhan Pajak

No.	Pernyataan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak					
2.	Saya mengisi formulir pajak dengan benar dan tepat					
3.	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya					
4.	Saya membayar sebelum tanggal jatuh tempo					
5.	Saya melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu					

Sumber: OECD (2004)

B. Kemampuan Membayar Pajak (X1)

Pernyataan Varibel Kemampuan Membayar Pajak

No.	Pernyataan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Saya menyiapkan ID Billing untuk membayar pajak.					
2.	Saya berusaha mencari informasi mengenai cara membayar pajak.					
3.	Saya mengetahui batas waktu pembayaran pajak					
4.	Saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak.					
5.	Saya menggunakan dana alokasi dalam membayar pajaknya					

Sumber: Karlinah (2022)

5. Dilema Sosial (X2)

Pernyataan Variabel Dilema Sosial

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Menurut saya pemerintah bisa dipercaya					
2.	Pemerintah memperhatikan semua kepentingan warga negara					
3.	Saya percaya bahwa keuangan negara dikelola dengan transparansi dan tanggung jawab					
4.	Temannya mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak (mematuhi ketentuan perpajakan)					
5.	Petugas pajak mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak (mematuhi ketentuan perpajakan)					
6.	Pimpinan di tempat saya bekerja mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak (mematuhi ketentuan pajak)					
7.	Otoritas pajak memiliki kekuatan di bidang perpajakan					
8.	Penyelidikan terkait pajak dilakukan oleh otoritas pajak					
9.	Tidak mudah menghindari pajak					

Sumber: Cahyonowati (2023)

**PENGISIAN KUESIONER PENELITIAN PADA WAJIB PAJAK DI KPP
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**



MOHON SCAN BARCODE DI ATAS

**KESEDIAAN BAPAK/IBU/SAUDARA/I SANGAT MEMBANTU
KELANCARAN PENELITIAN INI. ATAS WAKTU DAN
PERHATIANNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.**

LAMPIRAN 5

HASIL PENGUMPULAN DATA KUESIONER

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang digunakan	63	63%

Sumber: Data yang diolah (2024)

LAMPIRAN 6

PRESENTASE JENIS KELAMIN RESPONDEN

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	35	55,6%
Perempuan	28	44,4%
Total	63	100%

Sumber: Data yang diolah (2024)

LAMPIRAN 7

PRESENTASE UMUR RESPONDEN

Umur	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
21-30	27	42%
31-40	18	29%
41-50	12	20%
51-60	6	9%
>60	0	0%
Total	63	100%

Sumber: Data yang diolah (2024)

LAMPIRAN 8

PRESENTASE PENDIDIKAN RESPONDEN

Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
SMA	5	8%
D3	9	14,2%
S1	45	71,4%
S2	4	6,4%
S3	0	0%
Total	63	100%

Sumber: Data yang diolah (2024)

LAMPIRAN 9

HASIL ANALISIS TANGGAPAN RESPONDEN

Pernyataan	Skor					Jumlah
	SS	S	N	TS	STS	
X1.1	19	35	9	-	-	63
X1.2	38	23	2	-	-	63
X1.3	17	29	15	2	-	63
X1.4	23	34	6	-	-	63
X1.5	18	40	5	-	-	63
Pernyataan	Skor					Jumlah
	SS	S	N	TS	STS	
X2.1	6	25	26	6	-	63
X2.2	5	23	28	7	-	63
X2.3	3	28	25	7	-	63
X2.4	5	38	19	1	-	63
X2.5	25	35	2	1	-	63
X2.6	13	42	8	-	-	63
X2.7	29	30	4	-	-	63
X2.8	33	26	4	-	-	63
X2.9	35	26	2	-	-	63

Pernyataan	Skor					Jumlah
	SS	S	N	TS	STS	
Y1	23	40	-	-	-	63
Y2	44	19	-	-	-	63
Y3	27	36	-	-	-	63
Y4	41	22	-	-	-	63
Y5	43	20	-	-	-	63

Sumber: Data yang diolah (2024)



LAMPIRAN 10

REKAPITULASI DATA KUESIONER VARIABEL X1

Responden	Kemampuan Membayar Pajak (X1)					Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	4	5	4	4	4	21
2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	4	24
4	5	5	5	4	4	23
5	4	4	4	4	3	19
6	4	4	3	3	4	18
7	4	4	3	4	3	18
8	3	5	5	4	4	21
9	5	5	4	4	4	22
10	4	4	5	4	4	21
11	4	5	5	5	5	24
12	5	5	5	5	5	25
13	4	5	5	5	4	23
14	5	5	5	5	5	25
15	4	4	4	4	4	20
16	5	4	4	4	4	21
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	3	4	4	19
20	5	5	5	5	5	25
21	4	5	4	4	4	21
22	4	4	4	4	4	20
23	3	3	4	5	5	20
24	3	4	4	4	4	19
25	3	4	4	4	4	19
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	3	3	18
28	4	5	4	5	4	22
29	4	4	4	4	4	20
30	5	5	4	4	4	22
31	4	5	3	5	4	21
32	5	5	5	5	5	25
33	4	5	4	5	5	23
34	5	5	3	4	4	21
35	5	5	4	5	4	23
36	4	5	4	4	4	21
37	3	4	3	5	5	20
38	4	5	3	4	4	20

39	4	4	3	5	5	21
40	4	4	3	3	3	17
41	5	5	5	3	4	22
42	4	5	3	5	5	22
43	4	5	4	5	5	23
44	5	5	5	5	5	25
45	5	4	4	3	3	19
46	4	5	4	4	4	21
47	3	5	3	4	4	19
48	4	5	5	5	5	24
49	3	4	3	4	4	18
50	5	5	5	5	5	25
51	5	5	5	4	4	23
52	4	5	4	4	4	21
53	3	5	2	4	4	18
54	4	3	3	4	4	18
55	5	5	4	5	5	24
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	2	4	4	18
58	3	4	3	3	4	17
59	4	5	3	4	4	20
60	4	5	4	4	4	21
61	5	5	5	5	5	25
62	4	5	4	4	4	21
63	4	5	4	5	5	23

LAMPIRAN 11

REKAPITULASI DATA KUESIONER VARIABEL X2

Respon	Dilema Sosial (X2)									Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	
1	3	3	3	4	4	3	4	5	4	33
2	5	4	4	5	5	5	5	5	5	43
3	4	5	4	4	4	4	4	4	5	38
4	3	3	3	4	4	4	5	4	5	35
5	5	4	3	3	3	4	4	4	4	34
6	3	4	3	4	4	4	3	3	4	32
7	3	3	3	4	5	5	4	5	5	37
8	3	3	3	4	4	4	4	4	5	34
9	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
12	3	3	3	4	4	4	3	3	3	30
13	3	4	4	5	5	5	4	4	5	39
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
15	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
16	5	3	5	4	5	4	5	4	5	40
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	2	2	2	3	4	4	4	5	4	30
19	4	3	4	4	2	3	3	4	4	31
20	3	3	4	2	4	3	3	3	4	29
21	4	3	3	4	3	5	4	3	4	33
22	3	3	3	3	4	4	4	4	4	32
23	5	5	5	4	4	4	4	4	5	40
24	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
25	3	4	3	3	4	4	4	4	5	34
26	3	3	3	3	4	4	4	4	4	32
27	3	3	3	3	4	4	4	4	4	32
28	2	2	2	3	4	3	5	4	5	30
29	3	3	3	3	4	4	4	4	4	32
30	2	2	2	3	5	4	5	5	3	31
31	3	3	3	4	4	5	5	5	4	36
32	4	3	4	4	5	5	5	5	5	40
33	4	4	4	4	5	4	4	5	5	39
34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
35	3	3	3	4	5	3	5	5	5	36
36	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
37	3	3	3	4	5	4	5	5	5	37
38	4	4	4	4	4	4	5	5	4	38

39	3	3	3	4	4	4	5	5	4	35
40	4	4	4	4	5	4	4	4	5	38
41	2	2	2	3	4	3	5	5	5	31
42	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
43	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
44	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
45	3	2	2	3	4	4	5	5	5	33
46	4	4	4	4	5	5	5	5	5	41
47	3	3	3	3	5	5	5	5	5	37
48	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
49	2	2	2	3	4	4	4	4	4	29
50	4	4	4	4	5	4	5	5	5	40
51	4	4	4	4	5	4	5	5	5	40
52	3	3	3	4	5	5	5	5	5	38
53	2	2	2	3	4	4	5	5	5	32
54	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
55	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
56	4	5	4	3	5	3	5	5	5	39
57	3	3	4	3	4	4	4	5	5	35
58	3	3	4	4	5	4	4	5	5	37
59	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
60	3	3	3	3	5	4	4	5	4	34
61	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
62	4	3	4	3	5	3	5	5	5	37
63	4	4	4	3	5	4	5	5	5	39

LAMPIRAN 12

REKAPITULASI DATA KUESIONER VARIABEL Y

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					Total
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
1	5	4	5	4	4	22
2	5	5	5	5	5	25
3	4	5	5	5	5	24
4	4	5	5	4	5	23
5	4	4	4	4	4	20
6	5	5	4	4	4	22
7	4	5	4	4	5	22
8	4	4	4	5	5	22
9	4	5	5	5	5	24
10	4	4	4	4	4	20
11	4	5	4	4	4	21
12	4	4	4	4	4	20
13	4	5	4	5	4	22
14	5	4	5	5	5	24
15	5	5	5	5	5	25
16	4	5	5	5	5	24
17	4	5	5	5	5	24
18	4	4	4	5	4	21
19	4	4	4	4	5	21
20	4	5	4	5	5	23
21	5	5	5	4	4	23
22	4	4	4	4	4	20
23	5	5	5	5	5	25
24	4	4	4	4	4	20
25	4	5	4	5	5	23
26	4	4	5	4	5	22
27	4	5	4	4	5	22
28	5	5	4	5	4	23
29	4	4	4	4	4	20
30	4	5	4	4	5	22
31	5	5	5	5	5	25
32	5	5	5	5	5	25
33	4	5	5	5	5	24
34	5	4	4	5	5	23
35	4	5	4	5	5	23
36	5	5	4	5	5	24
37	4	5	4	4	5	22
38	4	5	4	5	5	23

39	4	4	4	5	5	22
40	4	5	4	5	4	22
41	4	4	4	4	5	21
42	4	4	4	5	5	22
43	5	5	5	5	4	24
44	5	5	5	5	5	25
45	4	5	4	4	4	21
46	5	5	5	5	5	25
47	5	5	4	4	4	22
48	4	5	4	5	5	23
49	4	4	4	4	4	20
50	5	5	5	5	5	25
51	5	5	5	5	5	25
52	5	4	5	5	5	24
53	4	5	4	4	4	21
54	4	5	4	5	5	23
55	5	5	5	5	5	25
56	5	5	4	5	5	24
57	4	5	5	5	5	24
58	4	5	5	5	4	23
59	4	5	4	5	4	22
60	4	4	4	5	5	22
61	5	5	5	5	5	25
62	4	5	5	5	5	24
63	5	5	5	5	5	25

LAMPIRAN 13

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KEMAMPUAN MEMBAYAR PAJAK (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.410**	.502**	.209	.170	.661**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.101	.183	.000
	N	63	63	63	63	63	63
X1.2	Pearson Correlation	.410**	1	.364**	.380**	.331**	.676**
	Sig. (2-tailed)	.001		.003	.002	.008	.000
	N	63	63	63	63	63	63
X1.3	Pearson Correlation	.502**	.364**	1	.338**	.330**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003		.007	.008	.000
	N	63	63	63	63	63	63
X1.4	Pearson Correlation	.209	.380**	.338**	1	.785**	.741**
	Sig. (2-tailed)	.101	.002	.007		.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63
X1.5	Pearson Correlation	.170	.331**	.330**	.785**	1	.710**
	Sig. (2-tailed)	.183	.008	.008	.000		.000
	N	63	63	63	63	63	63
Total	Pearson Correlation	.661**	.676**	.758**	.741**	.710**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	63	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X2.9	Pearson Correlation	.242	.265*	.335**	.202	.460**	.168	.558**	.501**	1	.628**
	Sig. (2-tailed)	.056	.036	.007	.113	.000	.189	.000	.000		.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Total	Pearson Correlation	.733**	.718**	.740**	.643**	.606**	.521**	.545**	.501**	.628**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



LAMPIRAN 15

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total
Y1	Pearson Correlation	1	.211	.476**	.279*	.117	.629**
	Sig. (2-tailed)		.097	.000	.027	.363	.000
	N	63	63	63	63	63	63
Y2	Pearson Correlation	.211	1	.290*	.317*	.196	.595**
	Sig. (2-tailed)	.097		.021	.011	.124	.000
	N	63	63	63	63	63	63
Y3	Pearson Correlation	.476**	.290*	1	.365**	.340**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000	.021		.003	.006	.000
	N	63	63	63	63	63	63
Y4	Pearson Correlation	.279*	.317*	.365**	1	.471**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.027	.011	.003		.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63
Y5	Pearson Correlation	.117	.196	.340**	.471**	1	.634**
	Sig. (2-tailed)	.363	.124	.006	.000		.000
	N	63	63	63	63	63	63
Total	Pearson Correlation	.629**	.595**	.748**	.728**	.634**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	63	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 16**HASIL UJI RELIABILITAS KEMAMPUAN MEMBAYAR PAJAK (X1)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.748	5

LAMPIRAN 17**HASIL UJI RELIABILITAS DILEMA SOSIAL (X2)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.810	9

LAMPIRAN 18**HASIL UJI RELIABILITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.689	5

LAMPIRAN 19

HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.16351896
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.069
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

LAMPIRAN 20

HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS

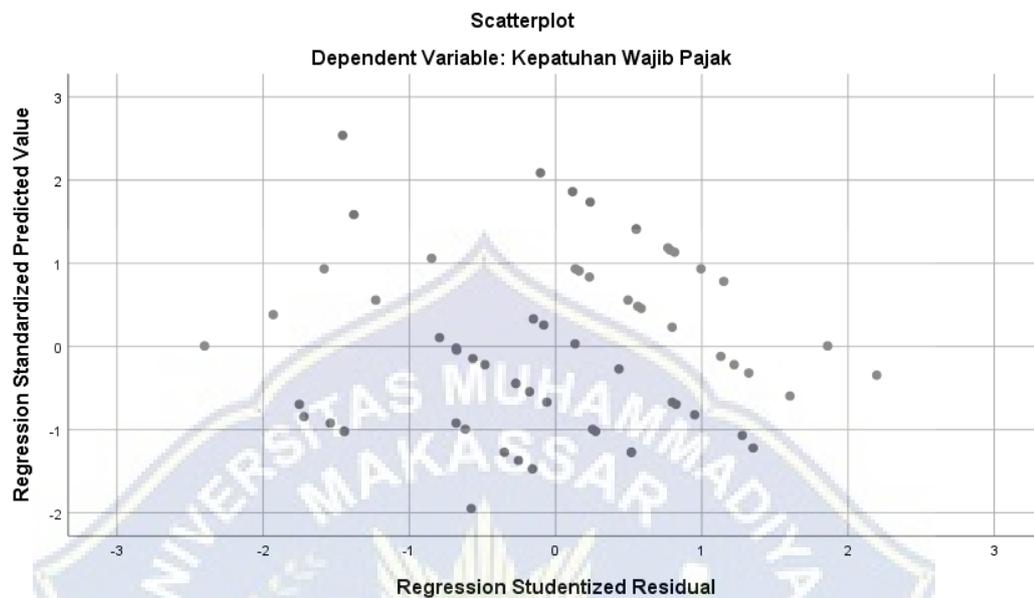
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.927	1.699		6.433	.000		
	Kemampuan Membayar Pajak	.139	.071	.198	1.958	.055	.856	1.169
	Dilema Sosial	.249	.043	.589	5.819	.000	.856	1.169

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

LAMPIRAN 21

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS



LAMPIRAN 22

HASIL ANALISIS BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.927	1.699		6.433	.000		
	Kemampuan Membayar Pajak	.139	.071	.198	1.958	.055	.856	1.169
	Dilema Sosial	.249	.043	.589	5.819	.000	.856	1.169

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

LAMPIRAN 23

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.689 ^a	.474	.457	1.183

a. Predictors: (Constant), Dilema Sosial, Kemampuan Membayar Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

LAMPIRAN 24

HASIL UJI SIGNIFIKAN T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.927	1.699		6.433	.000
	Kemampuan Membayar Pajak	.139	.071	.198	1.958	.055
	Dilema Sosial	.249	.043	.589	5.819	.000

LAMPIRAN 25

HASIL UJI SIMULTAN F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	75.780	2	37.890	27.086	.000 ^b
	Residual	83.934	60	1.399		
	Total	159.714	62			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Dilema Sosial, Kemampuan Membayar Pajak

LAMPIRAN 27

BIOGRAFI PENULIS



Salsabila lahir di Sumbawa pada tanggal 15 Mei 2001 dari pasangan suami istri Bapak Hasanuddin, SE dan Ibu Indriati, S.Pd. Penulis adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Paccing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu SD Inpres 6/75 Paccing lulus tahun 2012, SMPN 4 Watampone lulus tahun 2016, SMAN 16 Bone lulus tahun 2019, Program D3 Perpajakan di Universitas Muhammadiyah Makassar lulus tahun 2022, dan kemudian mengikuti program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2024. Selama penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir Skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak utamanya bagi almamater kampus.